

Api Abadi di Tanah Wangan dan Jagalingou, Perjuangan Spiritual Melawan Tambang Batu Bara

Updates. - TELISIKFAKTA.COM

Jul 12, 2025 - 20:32



Adrian Burragubba dan Anaknya

AUSTRALIA - Di hamparan tanah berdebu Wangan dan Jagalingou, Queensland, Australia, sebuah api seremonial kecil telah menyala tanpa henti selama lebih dari 1.300 hari. Api yang tak kunjung padam ini menandai lokasi protes yang telah berlangsung lebih dari empat tahun, menjadi jantung dari

konflik berkepanjangan antara sebagian komunitas adat setempat dan tambang batu bara Carmichael, salah satu proyek pertambangan paling kontroversial di Australia.

Tambang yang dimiliki oleh raksasa energi India, Adani, yang beroperasi secara lokal sebagai Bravus, berdiri tepat di seberang jalan. Lokasinya berada di tanah tradisional masyarakat Wangan dan Jagalingou (W&J). Adrian Burragubba dan putranya, Coedie McAvoy, telah memimpin kampanye panjang melawan Bravus, sebuah perjuangan yang mereka pandang sebagai penegasan spiritual sekaligus pertarungan untuk kelangsungan budaya.

"Di mana tanah saya berada, ada tambang yang mencoba menghancurkan negara saya," ungkap Adrian. "Negara itu adalah peta jalan menuju sejarah dan pengetahuan saya tentang siapa saya dan leluhur saya."

Inti dari perlawanan mereka adalah Doongmabulla Springs, sebuah situs suci yang mereka yakini diciptakan oleh ular pelangi Mundagudda, entitas leluhur yang kuat dalam banyak cerita penciptaan Aborigin kuno, sering dikaitkan dengan air, penciptaan, dan tanah.

Doongmabulla Springs terhubung dengan sistem air bawah tanah yang lebih besar, yang menjaga kelangsungan hidup tanah kering. Situs ini berada di atas Cekungan Galilee, salah satu cadangan batu bara terbesar yang belum terjamah di dunia, sebuah wilayah seluas 247.000 kilometer persegi yang mengandung lebih dari 30 miliar ton batu bara.

Beberapa ilmuwan, termasuk Profesor Matthew Currell, salah satu hidrolog terkemuka Australia dari Griffith University di Melbourne, menyatakan bahwa situs tersebut memiliki arti ekologis yang penting dan berpotensi rentan.

"Kami mulai memperhatikan beberapa hal, dari waktu ke waktu mendeteksi hidrokarbon di dalam air mata air itu sendiri," ujar akademisi yang telah mempelajari area tersebut selama bertahun-tahun. "Jika hidrokarbon baru muncul setelah penambangan, maka kita harus menjelaskan mengapa. Jika itu terkait dengan aktivitas penambangan, maka itu adalah tanda bahaya bahwa kualitas air mata air terancam dalam waktu dekat."

"Kami melihat tanda-tanda bahwa dampak dari tambang lebih besar dari yang diperkirakan saat disetujui. Saya pikir itu perlu mendorong evaluasi ulang penuh terhadap persetujuan tersebut," tambahnya.

Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa aktivitas penambangan dapat berdampak lebih besar pada air tanah daripada perkiraan awal. Temuan Profesor Currell, yang ditulis bersama Dr. Angus Campbell dan ditinjau sejawat pada tahun 2024, telah menimbulkan kekhawatiran tentang pemodelan air tanah Adani/Bravus.

Perusahaan menolak temuan tersebut dan menuduh beberapa penulis artikel tersebut sebagai aktivis anti-batu bara, tuduhan yang mereka bantah.

Badan sains nasional Australia, CSIRO, juga meninjau analisis Adani tentang dampak tambang Carmichael terhadap air tanah di area tersebut pada tahun

2023. Tinjauan tersebut, yang merupakan bagian dari bukti yang diperiksa dalam kasus pengadilan yang sedang berlangsung, menyimpulkan bahwa model Adani tidak "sesuai untuk tujuan" menilai dampak tambang terhadap mata air.

Pada tahun 2023, setelah meninjau data pemantauan air tanah Adani/Bravus, pemerintah melarang rencana penambangan bawah tanah mereka karena ketidakpastian mengenai dampaknya terhadap mata air. Adani menantang larangan ini di pengadilan, bersikeras bahwa mereka telah mematuhi standar lingkungan dan hukum.

"Tidak ada pelanggaran terhadap kondisi air tanah kami dan kompleks Doongmabulla Springs tidak berada dalam risiko dari penambangan yang kami lakukan sekarang atau yang diizinkan untuk dilakukan di masa depan," kata Adani dalam pernyataan kepada BBC.

Menteri Lingkungan Queensland, Andrew Powell, mengatakan kepada BBC: "Kami berkomitmen untuk melindungi nilai-nilai budaya dan lingkungan mata air dengan mengambil tindakan penegakan hukum yang sesuai."

Keputusan pemerintah untuk menyetujui tambang Carmichael telah mempolarisasi Australia selama hampir satu dekade. Adrian Burragubba dan keluarganya berpendapat bahwa tambang tersebut mengancam sumber air suci mereka, dan bahwa hak-hak mereka, budaya, serta hubungan mereka dengan "country" (tanah leluhur masyarakat adat Australia) diabaikan.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, yang diadopsi pada tahun 2007, mengharuskan "negara untuk mendapatkan persetujuan bebas, sebelumnya, dan terinformasi sebelum melakukan proyek yang memengaruhi hak atas tanah, termasuk penambangan." Meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi tersebut berfungsi sebagai kerangka kerja untuk menyelaraskan hubungan antara negara dan masyarakat adat.

Kontroversi seputar tambang ini juga telah lama menjadi titik nyala dalam perdebatan iklim, menarik aksi protes di seluruh negeri dan dukungan kuat dari komunitas pertambangan lokal. Pemerintah Queensland telah menyetujui proyek tersebut, dengan alasan potensi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekspor.

Australia sudah menjadi salah satu produsen batu bara terkemuka di dunia. Tambang Carmichael mengeksport ke wilayah Asia-Pasifik, di mana permintaan batu bara diproyeksikan tetap tinggi, bahkan ketika ekonomi berupaya menggunakan lebih banyak energi terbarukan.

Bravus menyatakan telah menginvestasikan lebih dari \$486 juta di kota tempat banyak pekerja tambang tinggal. Namun, tuduhan kondisi kerja yang buruk juga muncul.

Jurnalis Kim Nguyen, yang telah bertahun-tahun meliput cerita tentang tambang Carmichael, berbicara dengan para pekerja yang mengatakan bahwa mereka terpapar tingkat debu yang tidak aman, dipaksa bekerja di infrastruktur yang tidak memadai, dan menghadapi budaya ketakutan ketika menyuarakan keprihatinan.

Regulator keselamatan pertambangan Queensland mengonfirmasi adanya 875 halaman laporan kecelakaan serius dari tahun 2019 hingga 2024, tetapi menyatakan bahwa tingkat insiden tambang "secara umum konsisten dengan rata-rata industri."

Bravus menanggapi: "Kami memiliki catatan nol kematian (...) Kami mempertahankan standar tinggi, mematuhi semua undang-undang, mendorong orang untuk menyuarakan keprihatinan secara anonim atau langsung, dan ini diselesaikan saat muncul."

Setelah pemerintah negara bagian menyatakan akan menyetujui tambang tersebut tanpa persetujuan adat, tujuh dari dua belas kelompok keluarga W&J menandatangani perjanjian tanah dengan Adani sebagai imbalan atas dana komunitas.

"Ini memecah belah keluarga," kata wanita W&J, Jackie Broderick. "Saya merasa buruk tentang perusakan tanah, tetapi jika kami tidak setuju [dengan proyek tambang], mereka tetap akan melanjutkannya. Kami mendapatkan apa yang kami bisa," ujarnya.

Yang lain percaya bahwa kesepakatan itu terlalu mahal. "Penambangan adalah Tuhan di negeri ini. Satu tambang telah memecah belah seluruh bangsa," kata Coedie.

Dalam sebuah pernyataan, Bravus mengatakan: "Adrian Burragubba dan sekutunya dalam gerakan anti-bahan bakar fosil telah bertahun-tahun mencoba mendiskreditkan perusahaan kami dan menghentikan tambang Carmichael kami, yang telah beroperasi secara aman dan bertanggung jawab sesuai dengan hukum Queensland dan Australia."

Pada tahun 1915, Undang-Undang Perlindungan Aborigin Queensland mengizinkan pengusiran paksa orang Aborigin dari tanah mereka. Banyak orang W&J dikirim lebih dari 1.000 km jauhnya. Keluarga terpisah dan praktik budaya Aborigin dilarang.

Pada tahun 1993, Native Title Act memberikan hak tanah terbatas kepada orang Aborigin jika mereka dapat membuktikan keterikatan terus-menerus dengannya, termasuk hak untuk bernegosiasi mengenai proyek pertambangan.

Masyarakat W&J mengajukan klaim Native Title pada tahun 2004. Dengan itu, mereka memiliki hak untuk bernegosiasi dengan Adani, yang menawarkan keuntungan sebagai imbalan atas penandatanganan perjanjian. Namun, pada tahun 2012 dan lagi pada tahun 2014, tidak ada kesepakatan yang dapat dicapai, sehingga Adani mencari persetujuan melalui Native Title Tribunal tanpa persetujuan adat.

Pada tahun 2021, setelah 17 tahun, seorang hakim menolak klaim Native Title W&J, menghilangkan hak mereka untuk konsultasi atau kompensasi untuk tambang di masa depan berdasarkan hukum. Ini karena mereka gagal membuktikan keterikatan yang cukup dengan tanah tersebut.

"Seorang hakim pada akhirnya memutuskan bahwa hak asli tidak ada di wilayah

klaim, dan sekarang sedang diajukan ke Mahkamah Agung Australia untuk izin khusus mengajukan banding," kata Tim Wishart, kepala Layanan Native Title Queensland Selatan.

"Saya tidak berpikir ini adalah sistem yang adil, tetapi ini adalah satu-satunya yang kami miliki saat ini," tambahnya.

Adrian kini sedang mengajukan peninjauan yudisial di Pengadilan Tinggi Queensland, dengan alasan bahwa tambang tersebut melanggar hak asasi manusia komunitasnya dengan mengancam situs suci.

Argumen mereka didasarkan pada Bagian 28 Undang-Undang Hak Asasi Manusia negara bagian tersebut, yang melindungi hak masyarakat adat untuk mempraktikkan budaya mereka dan memelihara hubungan mereka dengan tanah dan air.

Ini adalah kasus yang dapat menjadi preseden, kata Alison Rose, pengacara Adrian dan Coedie. "Ini akan menjadi kasus uji yang sangat penting yang akan diikuti oleh masyarakat Pribumi [Adat] lainnya yang ingin melindungi budaya dan negara," katanya.

Ini adalah kasus keempat Adrian melawan pemerintah, menggunakan pengacara pro bono. Sebelumnya, ia bangkrut setelah kalah dalam satu kasus pengadilan dan dikenakan biaya \$680.000.

Namun, terlepas dari kebangkrutan, kekalahan pengadilan, dan keretakan internal komunitas, Adrian, putranya Coedie, dan keluarga mereka tetap tidak gentar.

"Kami berasal dari air," kata Adrian. "Tanpa air, kita semua mati. Tanpa tanah, kita tidak punya apa-apa."

Pemerintah Queensland telah meminta pengadilan untuk menolak kasus hak asasi manusia Adrian. Keputusan pengadilan belum keluar. (PERS)